

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Komitmen dalam upaya menyejahterakan masyarakat baik di tingkat global maupun nasional yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) (UNDRR, 2022). SDG's terdiri atas tujuh belas tujuan di antaranya menghilangkan kemiskinan, menghapus kelaparan, meningkatkan energi bersih dan terjangkau, kesetaraan gender, penciptaan hidup sehat dan makmur, layaknya air bersih dan sanitasi, pendidikan yang bermutu, mempersempit kesenjangan, mencukupinya pekerjaan dan ekonomi bertumbuh, meningkatkan industri, inovasi dan infrastruktur, kota dan permukiman yang kontinu, pengendalian peralihan iklim, mengembangkan kehidupan bawah laut, memajukan kehidupan daratan, menjamin perdamaian, keseimbangan dan memperkuat kelembagaan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari ketujuh belas tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut terdapat tujuan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini tepatnya tercantum dalam tujuan ke-13. Tujuan ke-13 tersebut menunjukkan bahwa perubahan cuaca yang ekstrem meningkat. Hal ini mengakibatkan bencana alam sehingga perlu melakukan penguatan sistem penguatan bencana (Gindo, 2022). Di Indonesia, realisasi dari tujuan ke-13 masih belum berjalan dengan ideal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masih terjadinya bencana.



Gambar 1.1 Data Bencana Di Indonesia Tahun 2019 – 2023

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (2024)

Bencana dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena atau kumpulan fenomena yang dipicu oleh faktor alam maupun non alam serta menimbulkan kerugian dan mengganggu kehidupan masyarakat (Taryana dkk, 2022). Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Hal ini dibuktikan dengan Gambar 1.1 yang menggambarkan bahwa bencana di Indonesia terjadi setiap tahun. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa tahun 2020 menjadi tahun tertinggi terjadinya bencana di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 5004 bencana. Dari 5004 bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, banjir menjadi bencana paling sering terjadi dengan 1531 kasus disusul oleh puting beliung sebanyak 1486 kasus dan tanah longsor sebanyak 1160 kasus. Sampai saat ini pun bencana seperti banjir masih terus terjadi di Indonesia apalagi Indonesia didominasi oleh lautan. Terjadinya banjir ini pun diperparah dengan semakin

sempitnya daerah – daerah resapan air di mana saat ini sudah banyak bangunan – bangunan yang menghambat penyerapan air hujan.

Banjir adalah keadaan di mana air melimpah ke luar atau menggenangi suatu tempat di sekitarnya karena hujan yang turun dalam waktu yang lama sehingga kapasitas air menjadi lebih besar dibandingkan kemampuan daya tampung tempat penampungnya (Ningrum & Ginting, 2020). Terdapat dua penyebab banjir yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan banjir seperti curah hujan, topografi dan geofisik sungai, kecacatan pada bangunan pengendali banjir, daya tampung sungai, tidak memadainya drainase, erosi dan sedimentasi, penurunan tanah, dan sebagainya. Sementara itu, faktor manusia yang menyebabkan banjir seperti peralihan tata guna lahan, dibangunnya kawasan tidak layak huni di sepanjang sungai, buruknya pembangunan sistem untuk mengendalikan banjir, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya (Razikin et.al., 2017). Bencana tertinggi yang melanda di Indonesia adalah banjir. Jumlah insiden banjir setiap tahun terus terjadi secara fluktuatif. Hal ini dapat terlihat dari data Badan Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yang disajikan pada Gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus banjir dengan kasus terbanyak terjadi di tahun 2020 dengan 1531 kasus.



Gambar 1.2 Data Bencana Banjir di Indonesia Tahun 2019 – 2023

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (2023)

Tingkat kerawanan bencana alam di Indonesia tergolong tinggi termasuk bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi di suatu daerah tersebut. Daerah yang berada di dataran rendah mengakibatkan daerah tersebut rentan terhadap bencana banjir. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki letak topografi yang berada pada dataran rendah. Hal ini juga terjadi di Kota Tangerang Selatan di mana mayoritas topografinya berada di dataran rendah sehingga memiliki risiko banjir yang tinggi (Wulandari dan Salam, 2022)

**Tabel 1.1 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Banten**

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
<b>A</b>	<b>Kabupaten</b>					
1	Lebak	403	14.356	16.775	31.534	Tinggi
2	Pandeglang	793	26.636	31.252	58.681	Tinggi
3	Serang	1.687	31.616	41.596	74.898	Tinggi

4	Tangerang	1.528	31.408	34.391	67.327	Tinggi
<b>B</b>	<b>Kota</b>					
1	Kota Cilegon	38	2.568	2.031	4.619	Tinggi
2	Kota Serang	650	7.690	4.230	12.570	Sedang
3	Kota Tangerang	580	8.544	3.727	12.851	Tinggi
4	Kota Tangerang Selatan	71	3.537	1.892	5.499	Tinggi
	<b>Provinsi Banten</b>	5.750	126.354	135.876	267.876	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa potensi bahaya bencana banjir di Provinsi Banten tergolong tinggi termasuk di Kota Tangerang Selatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa seluas 71 ha wilayah memiliki potensi bahaya rendah, 3.537 ha wilayah memiliki potensi bahaya sedang, dan seluas 5.499 ha wilayah memiliki bahaya tinggi. Hal ini didorong karena Kota Tangerang selatan merupakan daerah yang relatif datar. Potensi bahaya banjir yang tinggi di Kota Tangerang Selatan pun terlihat dari kasus yang terjadi setiap tahunnya di wilayah ini.

Banjir di Kota Tangerang Selatan masih menjadi permasalahan klasik yang terjadi setiap tahunnya. Pada 1 Januari 2020, banjir terjadi di enam kecamatan yang. Adapun kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Serpong, dan Kecamatan Ciputat. Dari keenam kecamatan tersebut, terdapat lima titik banjir di Kecamatan Ciputat dan tujuh titik di Kecamatan Pamulang. Hal ini pun dikutip dari wawancara yang disampaikan oleh Benyamin Davnie kepada Kompas.com pada 1 Januari 2020.

“Untuk data saat ini, Serpong Utara, Serpong, dan Ciputat Timur masing – masing memiliki satu area banjir dengan ketinggian antara 50 hingga 300 sentimeter. Ada dua titik di Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren dengan sekitar 500 Kartu Keluarga di 4 RW dan Graha Raya Nusa Indah 700 jiwa terkena dampak,” ucap Benyamin.



Gambar 1.3 Kondisi Bencana Banjir di Pondok Maharta  
Sumber : Kompas.com

Banjir yang melanda enam kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada 1 Januari 2020 lalu menimbulkan berbagai kerugian hingga menelan korban jiwa. Tercatat bencana tersebut menelan 4 korban jiwa. Empat korban tersebut terdiri dari dua warga dari Pondok Aren, satu warga Jurangmangu Timur, dan satu warga Ciputat Timur. Dikutip dari wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com, Benyamin Davnie selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

“Ada empat orang meninggal dunia saat hari banjir besar itu terjadi tanggal 1 Januari. Penyebabnya berbeda – beda. Korban pertama tenggelam saat banjir, korban kedua akibat kelelahan, korban ketiga diduga terpeleset saat tempat tinggalnya digenangi banjir, dan korban keempat meninggal karena terserum,” ujarnya

Pada 16 Juli 2022, banjir kembali menggenangi Perumahan Bukit Pamulang Indah. Hal ini terjadi karena hujan yang deras sejak 15 Juli 2022 yang mengakibatkan 14 titik wilayah tergenang banjir yaitu Perumahan Bukit Pamulang

Indah, Perumahan Pondok Maharta, Villa Bintaro Regency, Galeri Bintaro Rt 06 Rw 05, perumahan Pondok Safari Indah, perumahan Pondok Kacang Prima, Graha Mas Serpong, Cluster Griya Sutera Rw 006, perumahan Kampung Bulak, Perumahan lembah Pinus Pamulang, Graha Taman Bintaro, Taman Mangu Indah Puri Bintaro Indah, serta perumahan Rosewood Garden,. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada 16 Juli 2023.

“Hujan turun sangat lebat dan lumayan lama dari Jumat malam. Ada sekitar 14 titik banjir yang kita awasi,” ujar Uci Sanusi.

Pada 6 Oktober 2022 lalu, banjir melanda 18 lokasi di Kota Tangerang Selatan. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangerang Selatan yaitu M. Faridzal Gumay mengatakan bahwa hasil data sementara dilaporkan pada Jum'at, 7 Oktober 2022 pukul 00.50 WIB menunjukkan terdapat 18 lokasi banjir yang sudah berangsur surut dan dua titik terjadi longsor. Adapun titik lokasi terjadinya banjir dan tanah longsor ini seperti Perumahan Bukit Pamulang Indah dengan tinggi maksimal air mencapai 25 cm, Pondok Safari Indah dengan tinggi maksimal air mencapai 10 cm, Pondok Maharta dengan tinggi maksimal air mencapai 15 cm, Puri Bintaro Indah dengan tinggi maksimal air mencapai 25 cm, Jalan Swadaya dengan tinggi maksimal air mencapai 60 cm, Kelurahan Bambu Apus dengan tinggi maksimal air mencapai 60 cm, Pondok Payung dengan tinggi maksimal air mencapai 100 cm, Perumahan Citra Kencana dengan tinggi maksimal air mencapai 70 – 80 cm, Perumahan Pamulang Asri 2 dengan tinggi maksimal air mencapai 120 cm; Jalan Lembah 1 Kelurahan Cirendeu terkena longsor; dan Perumahan Benda Baru terkena longsor.

Pada 5 November 2022 lalu, banjir kembali melanda di 9 kawasan perumahan dan 1 sekolah. Adapun yang terdampak banjir terjadi di Perumahan Bukit Pamulang Indah, Pondok Safari, Kavling Kampung Bulak, Puri Bintaro, Jalan Wahid, Pondok Payung, Jalan Bhakti, Pondok Payung Mas, Legoso Raya dan MTSN 1 Pamulang. Selain itu, hal ini mengakibatkan penutupan jalan Tol Bintaro Serpong Damai (BSD). Dikutip dari akun twitter Info Tol BSD (@infotolbsd) pada 5 November 2022.

“Informasi terbaru pukul 15.25 WIB karena banjir, Gerbang Tol utama Pondok Ranji dan Pondok Aren 2 menuju Serpong dan BSD ditutup dihimbau mencari jalur alternatif”

Pada 5 Juni 2023, banjir melanda salah satu kecamatan di Kota Tangerang Selatan yaitu Kecamatan Pamulang. Salah satu daerah rawan terjadinya bencana banjir di kecamatan ini adalah Jalan Pinus Barat. Pada bulan Juni lalu, wilayah ini kembali terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 – 35 sentimeter. Terjadinya bencana banjir kali ini dipicu oleh hujan dengan intensitas yang tinggi dalam durasi kurang lebih selama 2 jam disertai angin yang kencang. Akibatnya, sebanyak 74 rumah dan 74 Kepala Keluarga terdampak bencana banjir.



Gambar 1.4 Bencana Banjir di Kelurahan Pamulang  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan



Awal tahun 2024 tepatnya tanggal 5 Januari lalu, banjir kembali melanda Kota Tangerang Selatan. Beberapa wilayah yang terendam banjir seperti Perumahan Bukit Pamulang Indah, Perumahan Reni Jaya, Perumahan Lembah Pinus dan Perumahan Pamulang Asri Tahap II. Dari wilayah – wilayah tersebut Perumahan Pamulang Asri Tahap II paling dalam ketinggian airnya. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Kedaruratan Logistik mengungkapkan bahwa ketinggian air saat itu bervariasi dari 30 – 100 centimeter (cm). Dari pantauan peneliti air mulai surut membutuhkan waktu hingga keesokan harinya.



Gambar 1.5 Banjir di Perumahan Reni Jaya  
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

Kejadian – kejadian di atas menunjukkan bahwa bencana banjir masih menjadi permasalahan klasik di Kota Tangerang Selatan. Padahal pada 2009 lalu terdapat bencana banjir di Kota Tangerang Selatan yang menelan banyak korban. Bencana ini terjadi di Situ Gintung, Kecamatan Ciputat pada 27 Maret 2009 silam. Bencana banjir terjadi karena tanggul Situ Gintung yang jebol. Jebolnya tanggul

tersebut karena hujan yang melanda dengan sangat deras sehingga tanggul tidak mampu menahan debit air. Akibat dari kejadian ini sebanyak 99 orang warga meninggal dunia, ratusan orang hilang dan merendam rumah – rumah yang berada dekat dengan area ini.

Terjadinya bencana banjir di Kota Tangerang Selatan ini menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Banjir pun menjadi masalah lama yang hingga hari ini masih terjadi sehingga pengentasan banjir ini menjadi permasalahan publik yang harus segera dilaksanakan. Hal ini mendorong dilakukannya upaya – upaya yang dapat mencegah dan mengentaskan banjir dengan melakukan kerja sama antar berbagai pihak. Adanya kerja sama tersebut selaras dengan pengertian Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Pasolong (2017) yang mendefinisikan Administrasi Publik sebagai suatu bentuk kolaborasi antara sekelompok orang ataupun lembaga dalam memenuhi kebutuhan melalui penyelenggaraan tugas pemerintahan publik secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengentasan bencana banjir perlu dilaksanakan dengan menggunakan fungsi – fungsi manajemen. Pengentasan banjir memerlukan penerapan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Pengentasan masalah banjir memerlukan berbagai upaya dan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat. Manajemen bencana menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Manajemen bencana dapat didefinisikan menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai suatu upaya peningkatan mutu dalam melaksanakan analisis

dan observasi bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, penanganan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui langkah – langkah yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus, dan sistematis. Sementara itu manajemen bencana didefinisikan University of Wisconsin sebagai upaya pembuatan kerangka pencegahan dan mengatasi dampak bencana bagi individu yang rentan terhadap bencana melalui kegiatan yang dirancang untuk pengendalian situasi bencana dan darurat. Manajemen bencana juga dapat didefinisikan sebagai tindakan mengelola bencana dan situasi darurat dengan menekan timbulnya kejadian dahsyat maupun mengendalikan kerentanan (Sambodo, 2018).

Pengertian – pengertian di atas menunjukkan bahwa penerapan manajemen bencana penting untuk dilaksanakan sebagai upaya pengurangan dampak negatif dari bencana yang terjadi. Pada pelaksanaannya, manajemen bencana dilaksanakan pada tiga waktu yaitu, sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Pada ketiga tahapan tersebut terdiri atas kegiatan – kegiatan yang bertujuan mengurangi bahkan menghilangkan risiko akibat bencana yang terjadi. Pada tahap pra bencana dilaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Pada tahap saat bencana dilaksanakan kegiatan tanggap darurat, dan bantuan darurat. Pada tahap pasca bencana dilaksanakan kegiatan pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi (Soehatman, 2011). Hal ini pun dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

Penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan pada pra bencana atau sebelum bencana dilakukan melalui pembentukan peraturan – peraturan terkait penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Salah

satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 188 Tahun 2012 tentang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 – 2042 di mana terdapat tujuh isu strategis yang dialami oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ketujuh isu strategis tersebut seperti banjir, ruang untuk investasi, persampahan, kemacetan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), potensi pariwisata, serta pertumbuhan ruang usaha. Adanya komitmen kuat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap ketujuh isu strategis tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan bersungguh – sungguh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu masalah strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dan menjadi fokus utamanya adalah terkait dengan penanganan banjir. Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir, peraturan ini menjadi acuan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Namun, masih ditemukan pembangunan yang tidak mengacu pada RTRW yang telah dibuat tersebut. Salah satu pembangunan yang melanggar RTRW di Kota Tangerang Selatan adalah pembangunan rumah dan kantor bisnis di area Perumahan Delatinos, Kota Tangerang Selatan. Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan menutup daerah resapan air. Hal tersebut dikutip dari hasil wawancara Kompas.com dengan Ketua RT setempat yang menyatakan bahwa :

“Mereka meniadakan resapan air. Hal ini bisa dilihat di jalan raya penuh dengan lumpur dari pembangunan” Ucap Ade.

Manajemen bencana tahap pra bencana juga dilakukan dengan melakukan peringatan dini. Peringatan dini bertujuan untuk memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat agar dampak negatif yang diterima tidak terlalu parah. Dalam

hal ini, Kota Tangerang Selatan telah membuat peta daerah rawan banjir di Kota Tangerang Selatan. Adanya peta tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berhati – hati jika hujan telah terjadi. Peta tersebut pun menjadi acuan bagi BPBD Kota Tangerang Selatan untuk melakukan evakuasi. Peringatan dini pun dilakukan dengan penyebaran informasi akan potensi terjadi bencana banjir melalui *Early Warning System* (EWS). Salah satu penyebab banjir di Kota Tangerang Selatan adalah karena kiriman dari wilayah lain seperti wilayah Bogor. Hal ini menunjukkan perlu adanya pemantauan di wilayah lain terutama di aliran kali Angke dan Ciliwung sehingga dapat memprediksi potensi banjir yang terjadi. Akan tetapi, pemantauan tersebut membutuhkan dana sehingga himbuan di aliran Cisadane akan adanya kiriman dari wilayah lain seperti Bogor belum dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya dana. Dikutip dari wawancara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang Selatan kepada Tempo pada tanggal 23 November 2023 sebagai berikut.

"Kami kurang pemantauan yang ada di Bogor, dananya tidak ada. Seharusnya itu dari provinsi bergerak. Karena kan menyeberang Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten yang terdampaknya,"

Sebelum terjadinya banjir tidak hanya dilakukan dengan memberikan informasi potensi banjir. Perlu pula dilakukan pembangunan pada sarana dan prasarana penunjang terutama penampung air hujan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, yaitu Ade Suprizal mengatakan bahwa dalam penanggulangan banjir Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan intervensi tata ruang yaitu dengan pengembangan pembangunan resapan dan bangunan penampung air

seperti Situ dan Tandon, penataan drainase, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, dan penerapan metode zonasi di zona perumahan. Akan tetapi, program – program tersebut belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Catatan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir wilayah Tangerang Raya mengalami penurunan pada jumlah situ. Salah satunya adalah Situ Rompong yang mengalami pendangkalan dan alih fungsi lahan menjadi perumahan hingga 60 persen. Selain itu, pembangunan turap yang tidak kunjung selesai menyebabkan banjir terus terjadi. Hal ini terjadi di Perumahan Puri Bintaro Indah yang dikutip dari berita Kompas.com.

Kurang optimalnya program – program Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanganan banjir terlihat dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada November 2022 menunjukkan hanya sebesar 45,6 persen tingkat kepuasan masyarakat kota Tangerang Selatan terkait penanganan masalah banjir. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi persoalan ini tergolong rendah sehingga menjadikan permasalahan banjir sebagai tiga persoalan utama yang harus segera diatasi.

Penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki peran yang penting. Salah satu faktor yang menghambat penanggulangan banjir ini pun didukung oleh minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan terutama dalam membuang sampah. Salah satunya

terlihat dari bencana banjir di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada 8 Juni 2022. Bencana banjir ini disebabkan oleh adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang membuang puing. Akibatnya, tumpukan sampah menzyebabkan aliran air Danau Situ Rawa Badak tersumbat.



Gambar 1.6 TPS Ilegal di Kota Tangerang Selatan

Sumber : Kompas.com

Komunikasi antar OPD Kota Tangerang Selatan juga belum berjalan dengan baik perihal penertiban izin pembangunan yang tidak berdasarkan regulasi yang ada. Hal ini pun salah satunya dapat terlihat dengan adanya pedagang kaki lima yang berada di Situ Tujuh Muara. Adanya pedagang kaki lima ini menambah sampah berserakan yang berada di pinggiran Situ Muara Tujuh atau Situ Pamulang. Selain itu, adanya pedagang kaki lima ini pun mempersempit daerah resapan air.



Gambar 1.7 Pedagang Kaki Lima di Situ Pamulang

Sumber : Palapa News

BPBD Kota Tangerang Selatan pun melaksanakan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan bencana banjir dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini memiliki sasaran bagi RT, RW, karang taruna, relawan kebencanaan hingga siswa di sekolah – sekolah. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana banjir. Selain itu, adanya pelatihan ini untuk membantu dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada proses evakuasi saat bencana terjadi. Sayangnya, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan ini hanya dihadiri oleh segelintir orang saja. Hal ini membuat pengetahuan individu satu dengan yang lainnya berbeda. Hal ini pun ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Vera Yanti (2020) bahwa sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir seperti melakukan pelatihan dan sosialisasi terutama pada warga yang berada di perumahan *elite*.

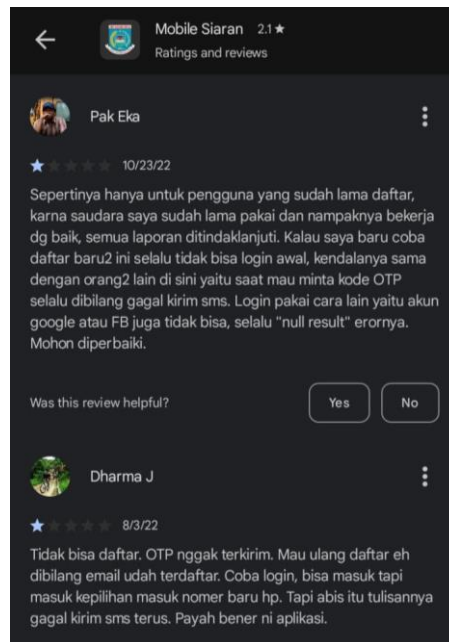




Gambar 1.8 Pelatihan dan Penyuluhan Bencana

Sumber : BPBD Kota Tangerang Selatan

Tahap saat bencana dilaksanakan dengan proses evakuasi dan pemberian bantuan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam memberikan laporan kepada BPBD Kota Tangerang Selatan. Bentuk laporan ini dapat disampaikan melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), melalui Whatsapp, telepon ke 112, aplikasi ataupun melalui website [siaran.tangerangselatankota.go.id](http://siaran.tangerangselatankota.go.id). Sayangnya, aplikasi siaran Tangerang Selatan yang tidak termanfaatkan dengan baik karena banyaknya komentar bahwa tidak dapat masuk ke dalam aplikasi hingga *rating* yang didapatkan hanya sebesar 2,1. Akan tetapi, tempat pelaporan lainnya masih dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan aduan terutama terkait bencana banjir.



Gambar 1.9 Komentar Aplikasi Mobile Siaran

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

Berjalannya penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memaksimalkan unsur – unsur manajemen yang disebut dengan 6M yaitu *men, method, money, machines, market, dan materials*. Dalam memaksimalkan unsur – unsur tersebut dilakukan pengarahan, pengoordinasian, dan mengarahkan kepada individu ataupun kelompok yang berperan dalam suatu kegiatan (Hasibuan, 2007). Dalam koordinasi inilah dapat menentukan kelancaran penyelesaian banjir di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Septi Dwi Wulandari dan Rahmat Salam (2022) menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan dalam penanggulangan banjir masih belum berjalan secara optimal terutama dalam tahap pasca bencana. Kurang optimalnya koordinasi tersebut pun terlihat dari

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada OPD yang berperan dalam penanggulangan bencana banjir belum dilaksanakan secara optimal. Adapun OPD yang berperan dalam penyelesaian bencana banjir di Kota Tangerang Selatan adalah BPBD Kota Tangerang Selatan yang berperan pada mitigasi bencana, Dinas Pekerjaan Umum yang berperan dalam pemeliharaan drainase dan Dinas Lingkungan Hidup yang berperan dalam pengelolaan sampah.

Koordinasi antar OPD di Kota Tangerang Selatan berjalan kurang optimal pun terjadi pada tahap pasca bencana yaitu rehabilitasi pada dampak lingkungan dan infrastruktur belum dijalankan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan drainase di beberapa titik dan normalisasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Salah satunya terjadi di Perumahan Bukit Nusa Indah. Hal tersebut menimbulkan aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan karena tuntutan yang diminta tidak dijalankan. Dikutip dari hasil wawancara kepada Radar Banten pada 7 Agustus 2023

“Kala itu kami meminta perbaikan drainase saat Musrenbang. Makanya kami kaget, kok yang datang malah pengerukan jalan *cone block* untuk pembangunan jalan beton,” ujar Maya, warga RT 01.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas mendorong penulis ingin meneliti lebih jauh terkait “Manajemen bencana (tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana) dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Jumlah kasus banjir di Kota Tangerang Selatan yang terus terjadi setiap tahun
2. Jumlah kerugian materiil dan korban jiwa akibat dari bencana banjir di Kota Tangerang Selatan
3. Tahap Pra Bencana :  
Pembangunan yang melanggar peraturan yang berlaku, keterbatasan dana untuk pemantauan, kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan, sulitnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, alih fungsi lahan Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang Selatan menjadi daerah pemukiman dan kurangnya komunikasi antar OPD dalam penertiban izin pembangunan.
4. Tahap Saat Bencana :  
Aplikasi yang belum berjalan sesuai dengan fungsinya
5. Tahap pasca bencana :  
Koordinasi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan yang berjalan kurang optimal dalam rehabilitasi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen bencana pada tahap pra bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan ?

2. Bagaimana manajemen bencana pada tahap saat bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan ?
3. Bagaimana manajemen bencana pada tahap pasca bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis manajemen bencana pada tahap pra bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.
2. Menganalisis manajemen bencana pada tahap saat bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.
3. Menganalisis manajemen bencana pada tahap pasca bencana dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik yang berfokus pada penanggulangan bencana banjir. Diharapkan juga bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki pelaksanaan manajemen bencana di Kota Tangerang Selatan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis terkait manajemen bencana di Kota Tangerang Selatan.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan manajemen bencana di Kota Tangerang Selatan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi dan wawasan tentang manajemen bencana di Kota Tangerang Selatan.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (*State of The Art*)**

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1.	Galih Razuna Alghifari (2020)	Mengetahui manajemen bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya.	Deskriptif Kualitatif	Teori Manajemen Bencana Ramli (2010) menunjukkan bahwa manajemen bencana dilakukan pada tiga tahapan : 1. Tahap pra bencana 2. Tahap saat bencana / tanggap darurat 3. Tahap pascabencana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pra bencana dimulai dengan membuat perencanaan dan peta rawan bencana, pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan, menggalakkan pelatihan dan membentuk desa tangguh bencana (Destana). Namun, tindakan pencegahan belum dilakukan. Tahap saat bencana melakukan kajian cepat, pendataan, melakukan evakuasi dan membangun akses darurat. Pada pelaksanaannya terhambat karena minimnya anggaran. Sementara itu, tahap pascabencana dilakukan perbaikan. Sayangnya, anggaran yang kurang memadai membuat pelaksanaannya terkendala.

2.	Febri Yanti dan Geovani Meiwanda (2022)	Melihat pelaksanaan manajemen bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi banjir	Deskriptif Kualitatif	Teori Manajemen Bencana menurut Ramlie (2010) menunjukkan bahwa manajemen bencana terdiri dari tiga tahap yaitu : 1. Tahap pra bencana 2. Tahap tanggap darurat 3. Tahap pascabencana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen bencana di Kabupaten Kuantan Singingi terkendala karena tidak adanya BPBD. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, Damkat, TNI, Polri pada tiga tahap. Pra bencana dilakukan sosialisasi, penyebaran peringatan dini, pembersihan sampah, serta pembangunan tanggul dan bendungan. Saat bencana dilakukan dengan memberikan bantuan dan mendirikan posko pengungsian. Sementara itu, pascabencana dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3.	Chyntia Aulia dan Geovani Meiwanda (2022)	Menganalisis Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat serta Kesiapsiagaan masyarakat dalam	Deskriptif Kualitatif	Teori Manajemen Bencana menurut Alexander, 2002; Coppola, 2007; King, 2007; Moe dan Patharanakul, 2006; Quarentelli, 2007 dalam Bevaola (2014:21) terdapat empat kegiatan dalam manajemen bencana, antara lain : 1. Mitigasi bencana 2. Kesiapsiagaan 3. Respons / Daya Tanggap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Solok telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir. Hal ini diawali pembuatan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Namun, target yang kurang jelas menghambat mengukur Tingkat keberhasilan manajemen bencana. Program yang dilakukan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mumpuni, menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), memberikan pelatihan



		menghadapi bencana banjir di Kota Solok		Pemulihan Pasca Bencana	tentang pencegahan dan mitigasi serta melakukan komunikasi dan edukasi.
4	Ferdiansyah, Cucu Sugiarti, dan Haura Atthara (2020)	Menganalisis BPBD Kota Bekasi dalam penyelenggaraan manajemen bencana sebagai upaya pengentasan masalah banjir di Kota Bekasi	Deskriptif Kaulitatif	Teori manajemen bencana menurut Agus (2012) menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan : 1. Pra Bencana a) Mitigasi b) Kesiapsiagaan c) Peringatan Dini 2. Saat Bencana 3. Pasca Bencana a) Rehabilitasi b) Rekonstruksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana dilakukan dengan adanya system peringatan dini pada lima lokasi di sepanjang aliran Sungai Cikeas – Cileungi. Kemudian, informasi disebarkan kepada masyarakat untuk waspada dan sudah berjalan dengan baik. Dilakukan pula sosialisasi tanggap darurat tetapi belum menyeluruh. Saat bencana dilaksanakan evakuasi pada korban bencana banjir tetapi belum maksimal. Pasca bencana dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi tetapi pembangunan fasilitas rusak terutama rumah warga lebih dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan uang pribadi.
5	Yusuf Falaq, Mifthatul Rahmawaty Jannah (2021)	Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Desa Niaso Muara Jambi dalam	Deskriptif Kualitatif	Teori Manajemen Bencana (Bevaola, 2014). Terdapat tiga tahap pada manajemen bencana, antara lain : 1. Pra Bencana 2. Saat Bencana 3. Pasca Bencana	Proses manajemen bencana penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Desa Niaso Muara Jambi masih mengalami berbagai hambatan. Pada tahap pra bencana, perencanaan yang kontijensi. Pada tahap pasca bencana pun masih ditemukan

		penanganan bencana banjir.			kekurangan karena pelaksanaan rehabilitasi yang kurang tepat. Terhambatnya manajemen bencana karena <i>mindset</i> masyarakat Jambi yang masih belum satu pikiran dengan BPBD Jambi.
6	Heny Suhindarno. (2021)	Keberjalanan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD terhadap banjir di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui strategi BPBD dalam mitigasi bencana banjir.	Deskriptif Kualitatif	Teori strategi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005).  1. Apa yang suatu organisasi ingin lakukan ( <i>intens to do</i> ) 2. Apa yang organisasi akhirnya lakukan ( <i>eventually does</i> )	Strategi BPBD antara lain :  - Pra Banjir : melakukan pemantauan tingkat muka air, memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dalam mengurangi potensi banjir, dan koordinasi dan bantuan antar instansi. - Saat banjir : Membentuk tim komando darurat, dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait. - Pasca banjir : Melakukan pengkajian dan penilaian dampak yang terjadi, rekonstruksi bangunan, dan mengira kebutuhan yang dibutuhkan pasca banjir.  Disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan berjalan dengan cukup baik

					tetapi masih perlu ditingkatkan karena permasalahan ini masih terus terjadi.
7	Faisal N, Muhammadiyah dan Abdi (2022)	Menggambarkan manajemen bencana penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur	Deskriptif Kualitatif	Teori Manajemen Bencana oleh Carter dalam (Candra, 2014). Manajemen bencana merupakan siklus yang terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons cepat, perbaikan dan pengembangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan empat tahap yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan respons cepat. Pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan personil dan peringatan dini. Pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan. Mitigasi dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada relawan, melakukan pemasangan alat peringatan dini dan program yang berkolaborasi dengan instansi lain. Kesiapsiagaan dilaksanakan dengan membuat SOP dan membentuk Tim Reaksi Cepat. Respons cepat dilaksanakan saat bencana terjadi dan sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan kembali.
8	Maria Herlina, Hotnier Sipahutar, Dyah	Mengidentifikasi model – model inovasi pelayanan Pemerintah	Deskriptif Kualitatif	Teori inovasi menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter terdapat tiga variabel	Terdapat berbagai inovasi yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia seperti SIPANDU

	Kusuma Wardani, Djoko Sulistyono, dan Muhammad Akbar Priadi. (2021)	dalam mitigasi bencana		yang mendorong adanya inovasi, antara lain : 1. Struktur 2. Budaya 3. Praktik Sumber Daya Manusia	MERAPI yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanganan letusan gunung berapi, Pemerintah Kota Semarang melalui SEMARISK dalam penanganan banjir, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui aplikasi SITABAH dalam mitigasi longsor. Dari ketiga inovasi tersebut inovasi SIPANDU MERAPI yang paling baik dilaksanakannya. Ketiga inovasi tersebut menjadi terobosan baru dalam merespon masalah mitigasi bencana di setiap daerah.
9	Ishwor Thapa, Laxmi Kanta Paudel. (2023)	Menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penerapan kebijakan manajemen bencana akibat air di Nepal.	Deskriptif Kualitatif	Bencana menurut Alexander, 2002; Coppola, 2007; King, 2007; sMoe dan Patharanakul, 2006; Quarentelli, 2007 dalam Bevaola (2014:21) terdapat empat kegiatan dalam manajemen bencana, antara lain : 1. Mitigasi bencana 2. Kesiapsiagaan 3. Respons / Daya Tanggap 4. Pemulihan Pasca Bencana	Terdapat berbagai permasalahan dalam mengatasi bencana akibat air ini seperti masalah terkait kebijakan, pendekatan partisipatif, alokasi sumber daya dan identifikasi bahaya serta kerentanan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Nepal. Adanya kebijakan ini masih belum berhasil karena kurangnya kepemilikan institusional. Selain itu, masih kurangnya politik dan komitmen kelembagaan serta lembaga pelaksana

					baik di pusat, provinsi maupun tingkat lokal.
10	Asha Mutiara Dimaputri, Faris Risyadi, Gigih Nur Putra Pratama, Mujahidin. (2022)	Memformulasikan strategi dalam penanganan banjir di Kota Samarinda	Deskriptif Kualitatif	Teori strategi menurut Fred R. David (2017). Terdapat tiga variabel utama dalam manajemen strategi, antara lain :  1. Perumusan strategi 2. Pelaksanaan strategi 3. Evaluasi strategi	Berbagai kelemahan maupun tantangan masih terjadi dalam pelaksanaan penanganan banjir di Kota Samarinda. Kelemahan : Kualitas SDM masih rendah Tantangan : kesadaran dan kepedulian masyarakat masih rendah Perlu adanya strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Samarinda yang dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Cara – cara yang dapat dilakukan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat perencanaan kebijakan publik yang berorientasi pada aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan;</li> <li>• Membangun komitmen semua pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Melibatkan partisipasi masyarakat.</li> </ul>

Sumber : Jurnal yang telah diolah, 2024

Penelitian pertama yang ditulis oleh Galih Razuna Alghifari (2020) memiliki perbedaan penelitian terletak pada lokus dari penelitian di mana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kabupaten Kampar. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Penelitian kedua ditulis oleh Febri Yanti dan Geovani Meiwanda tahun 2022. Perbedaan penelitian terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, informan yang digunakan pun berbeda di mana penelitian ini akan mewawancarai pihak BPBD sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mempunyai BPBD. Persamaan kedua penelitian dengan penelitian ini terlihat pada teori yang digunakan di mana menggunakan teori manajemen bencana Soehatman Ramli (2011) yang menganalisis manajemen bencana pada tiga tahapan, yaitu tahap pra bencana, tahap saat bencana dan tahap pascabencana.

Selanjutnya, penelitian ketiga ditulis oleh oleh Chyntia Aulia dan Geovani Meiwanda tahun 2022. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kota Solok Sumatera Barat. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Penelitian keempat ditulis oleh Ferdiansyah, Cucu Sugiarti dan Haura Atthahara pada tahun 2020. Perbedaan penelitian terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kota Bekasi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini

menggunakan teori manajemen bencana Agus (2012). Sementara itu, peneliti menggunakan teori manajemen bencana oleh Soehatman (2011).

Penelitian lainnya ditulis oleh Yusuf Falaq dkk pada tahun 2021 memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Desa Niaso Muara Jambi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ketujuh ditulis oleh Heny Suhindarno pada tahun 2021. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori strategi oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori manajemen bencana oleh Soehatman Ramli (2011). Selain itu, penelitian yang telah ditulis oleh Heny Suhindarno hanya berfokus pada satu tahap saja yaitu mitigasi bencana. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas manajemen bencana dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Faisal N, Muhammadiyah dan Abdi pada tahun 2022. Perbedaan penelitian terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana oleh Carter dalam (Candra

2014). Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori manajemen bencana oleh Soehatman Ramli (2011). Selain itu, ini hanya membahas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons cepat saja tanpa membahas perbaikan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas manajemen bencana dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Penelitian lainnya ditulis oleh Maria Herlina, Hotnir Sipahutar, Dyah Kusuma Wardani, Djoko Sulistyono, dan Muhammad Akbar Priadi (2021) memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Sleman, Sumedang, dan Semarang. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada mitigasi bencana seperti letusan gunung berapi, banjir dan longsor dengan melakukan inovasi. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus pada manajemen penanggulangan banjir.

Selanjutnya, penelitian kesembilan ditulis oleh Ishwor Thapa, Laxmi Kanta Paudel (2023) memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Nepal. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis SWOT untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada manajemen bencana yang telah dilakukan. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas terkait manajemen bencana. Penelitian kesepuluh ditulis oleh Asha Mutiara Dimaputri, Faris Risyadi, Gigih Nur Putra Pratama Mujahidin (2022) memiliki



perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada lokus dari penelitian dimana penelitian pertama ini memiliki lokus di Kota Samarinda. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki lokus di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis SWOT untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada manajemen bencana yang telah dilakukan. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas terkait manajemen bencana.

Kesepuluh penelitian yang diuraikan di atas sebagian besar berbicara tentang manajemen bencana yang dilakukan di masing – masing lokus. Semua penelitian dijadikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian terkait manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Terdapat kebaruan (*novelty*) antara penelitian – penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kebaruan ini dilihat dari teori yang digunakan peneliti yaitu teori manajemen bencana oleh Soehatman (2011). Pada teori ini melihat manajemen bencana yang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, dilihat dari lokus yang digunakan di mana peneliti lokus penelitiannya berada di Kota Tangerang Selatan. Kebaruan lainnya terlihat dari perspektif peneliti yang melihat manajemen bencana di setiap tahapan yaitu tahap pra bencana, tahap saat bencana dan tahap pasca bencana pada penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan sehingga nantinya dapat memberikan saran yang nantinya dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di mana tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik atau kebijakan publik untuk memenuhi keinginan publik. Terdapat beberapa pendapat mengenai Administrasi Publik dari beberapa ahli. Pertama, Pasolong (2017) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dalam mencukupi kepentingan publik dengan melakukan kerja sama secara efektif dan efisien antara sekelompok individu atau lembaga. Selain itu, Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan manajemen baik merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan melalui prosedur kerja yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) (Ibrahim, 2017). Sementara itu, administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya dan personel publik lalu dilakukan formulasi, implementasi dan dikelola dalam menjalankan kebijakan publik untuk memenuhi kepentingan publik.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma mengacu pada pemikiran atau sudut pandang seseorang atau sekelompok orang. Menggambarkan ide – ide yang digunakan para ahli dalam untuk menunjukkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan yang bertujuan menganalisis peristiwa sosial yang sedang

berkembang di masyarakat. Ilmu pengetahuan bergerak secara dinamis dan sering kali muncul suatu masalah sehingga munculnya paradigma baru. Menurut Nicholas Henry (1990) ada enam paradigma administrasi publik sebagai berikut

### **1. Paradigma 1 (1900-1926)**

Paradigma pertama disebut sebagai Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Goodnow yang berjudul “*Politics and Administration*” di tahun 1900 menunjukkan bahwa adanya pemisahan antara politik dan administrasi yang dilihat dari pusat perhatiannya. Politik memiliki konsentrasi pada kebijakan atau kehendak rakyat sedangkan administrasi memiliki konsentrasi pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini pun terlihat dari adanya pemisahan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, paradigma ini tidak mempunyai fokus yang jelas.

### **2. Paradigma 2 (1927-1937)**

Paradigma kedua disebut sebagai Prinsip – Prinsip Administrasi. Fayol dan Taylor memperkenalkan prinsip – prinsip administrasi sebagai fokus dari administrasi publik. Prinsip tersebut seperti *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting* (POSCORB). Adanya prinsip ini dianggap dapat diterapkan secara universal sehingga tidak ada lokus yang jelas.

### **3. Paradigma 3 (1950-1970)**

Paradigma ketiga disebut sebagai Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Terjadi pertentangan anggapan bahwa administrasi publik dapat diterapkan secara universal (*value free administration*) atau administrasi publik tidak dapat berlaku secara universal karena dipengaruhi nilai politik (*value laden politics*). Dalam pelaksanaannya, anggapan kedua diterapkan sehingga John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebagai ilmu politik. Hal ini mendorong munculnya paradigma baru yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya buram karena prinsip – prinsip administrasi publik menyimpan banyak kecacatan.

### **4. Paradigma 4 (1956-1970)**

Paradigma keempat dikenal sebagai Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik adalah bagian dari ilmu administrasi, tetapi bukan bagian dari ilmu politik. Paradigma ini memiliki fokus yaitu analisis sistem dan manajemen, teknologi modern, perilaku organisasi dan riset operasi yang merupakan perkembangan prinsip manajemen sebelumnya. Terjadi pula perkembangan di dua arah yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi dan ilmu administrasi berorientasi pada kebijakan publik sehingga dapat diterapkan pada administrasi publik dan administrasi bisnis. Akan tetapi, paradigma ini tidak memiliki lokus yang jelas.

## **5. Paradigma 5 (1970-sekarang)**

Paradigma kelima yang dikenal sebagai Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Kemunculan paradigma ini untuk menyempurnakan paradigma sebelumnya karena dalam paradigma ini telah mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik merupakan fokus administrasi publik. Sementara itu, masalah-masalah dan kepentingan publik merupakan lokusnya.

## **6. Paradigma 6 yaitu *Governance* (1990 – Sekarang)**

Paradigma keenam atau *Governance* menekankan bahwa dalam menjalankan tugas atau kebijakan, birokrasi tidak dapat merumuskan dan manajemen publik. Birokrasi tidak dapat bekerja sendiri melainkan perlu adanya kerja sama. Hal ini mendorong muncul *Governance* (Tata Kelola Pemerintahan) yang dilakukan melalui *Partnership, Collaboration, Networking* dengan menggunakan prinsip GG (*Good Governance*) yakni bagaimana tata kelola yang baik, GEG (*Good Enough Governance*) yakni bagaimana bekerja yang dianggap pantas dan CG (*Collaborative Governance*) yakni kolaborasi antar berbagai aktor.

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma kelima atau paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Di mana dalam penelitian ini nantinya akan berfokus pada teori manajemen tepatnya pada teori manajemen bencana dan lokusnya pada permasalahan mengenai banjir. Oleh karena itu, penelitian ini akan

membahas terkait manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.

#### **1.6.4 Manajemen Publik**

Manajemen merupakan suatu cara memperoleh tujuan yang ditetapkan organisasi melalui proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber – sumber daya organisasi serta kinerja dari para anggota organisasi (Handoko, 2012:8). Selain itu, Siswanto (2012 : 1) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu terhadap individu dalam pencapaian tujuan melalui pembuatan rencana, pengorganisasian, memberikan motivasi, dan mengendalikan. Sementara itu, Terry dan Nawawi (2011: 11) menyatakan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Buku Principles of Management menerangkan bahwa George R. Terry (1958) membagi empat fungsi dasar manajemen (Sukarna, 2011: 10), antara lain :

##### 1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan kegiatan penentuan dan penjabaran tujuan organisasi menjadi sebuah rencana baik berupa strategi maupun rencana program yang

nantinya akan dilaksanakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dibuatnya perencanaan dengan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan seperti menetapkan susunan organisasi, membagi tugas dan fungsi di tiap bidang, menetapkan kedudukan dan sifat hubungan yang ada di tiap bidang tersebut serta alur koordinasinya.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan pemberian motivasi dan cara kepemimpinan sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif, efisien, dan maksimal.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebelumnya, ditentukan pengukuran. Kemudian, jika terdapat ketidaksesuaiaan dilakukan evaluasi yang nantinya akan dilakukan tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut perencanaan.

Didasarkan pada penjelasan para ahli di atas, manajemen publik dapat diartikan sebagai suatu studi interdisipliner yang mencakup fungsi manajemen seperti, *planning, organizing, actuating, dan controlling* didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik. Selain itu, manajemen publik didefinisikan

sebagai upaya pengelolaan sumber daya yang untuk termuat didalamnya untuk menggapai tujuan di dalam suatu organisasi (Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008).

### **1.6.5 Manajemen Bencana**

Bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh alam dan memberikan efek besar terutama bagi populasi manusia seperti banjir, tsunami, tanah longsor, letusan gunung merapi, dan gempa bumi (Winarto, 2017). Bencana dapat pula didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang menjadi ancaman baik bagi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, keamanan maupun ekonomi masyarakat ataupun bagi hal yang lebih luas lagi (Fitriadi et.al, 2017). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana menjadi sebuah ancaman dan dapat menimbulkan dampak yang besar. Hal ini mendorong perlu adanya suatu upaya agar dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi tidak besar.

Langkah yang diterapkan secara terorganisir dan menyeluruh dalam menghindari peristiwa bencana dengan segera, cermat dan akurat dalam mengurangi timbulnya kerugian dan menelan korban adalah manajemen bencana (NFA 1600 : *Standard on Disaster / Emergency Management and Business Continuity Program* (dalam Soehatman Ramli, 2010). Manajemen bencana juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan sebagai dasar dalam melakukan pencarian melalui observasi secara tersusun, dan telaah bencana yang dapat meningkatkan usaha – usaha terkait preventif, pengurangan, perencanaan, tindakan darurat dan perbaikan (Carter, 2001 (dalam Syarief dan Kondoatic, 2006). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007



tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan manajemen bencana sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan ataupun meminimalkan ancaman bencana berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kebersamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Oleh karena itu, manajemen bencana sangat krusial untuk diterapkan terutama dalam menurunkan risiko dampak yang muncul pasca bencana terjadi.

#### **1.6.5.1 Teori Manajemen Bencana Menurut Soehatman**

Soehatman (2011 : 31) mendefinisikan bahwa manajemen bencana merupakan suatu mekanisme terstruktur dalam pengelolaan bencana secara tepat dan selamat melalui tiga tahapan, yaitu pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Adapun manajemen bencana dilaksanakan dalam tiga tahapan, antara lain :

##### **1. Manajemen Pra Bencana**

Manajemen pra bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menekan risiko bencana maupun ancaman yang muncul sebelum bencana tersebut terjadi (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007). Pada manajemen pra bencana mencakup usaha yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, deteksi dini, dan mitigasi.

##### **a. Kesiapsiagaan**

Tahap kesiapsiagaan merupakan runtutan aksi yang dilaksanakan untuk memprediksi bencana melalui pengelolaan serta melalui tindakan yang saksama dan praktis (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Kesiapsiagaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana secara tepat dan cepat (Aminudin, 2013). Pelaksanaan kesiapsiagaan bertujuan untuk mengurangi ancaman, mengurangi akibat negatif yang ditimbulkan, mengurangi kerentanan masyarakat, dan menjalin kerja sama (*The Indonesian Development of Education and Permaculture* (IDEP), 2007).

b. Deteksi dini atau Peringatan dini

Peringatan dini merupakan tahap di mana memberikan sinyal kepada masyarakat tentang potensi terjadinya bencana di suatu wilayah. Dalam penyampaian peringatan dini harus dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat waspada (Ramli, 2010). Peringatan dini dapat didefinisikan pula sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang dengan memberikan peringatan kepada masyarakat sebagai sinyal waspada akan kemungkinan terjadinya bencana di suatu wilayah (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007). Peringatan dini dapat diartikan pula sebagai suatu peringatan yang diberikan kepada masyarakat terkait potensi terdampak bencana di daerahnya masing – masing. Pemberian peringatan didasari pada laporan teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah dan didapatkan dari pihak berwenang terkait potensi hendak terjadinya suatu bencana atau bahaya (Soehatman, 2011 : 31).

### c. Mitigasi

Mitigasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka meredam risiko bencana, baik dengan melakukan pembangunan fisik maupun pemberdayaan dan pengembangan kapabilitas menghadapi bahaya bencana (Joko, 2011 : 279). Mitigasi bencana ini dapat dilaksanakan melalui melaksanakan pengelolaan ruang, menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan secara sederhana maupun modern, melakukan pembangunan prasarana, tata bangunan, dan penertiban pembangunan, (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

## 2. Manajemen Saat Bencana

Manajemen saat bencana adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menekan kerugian yang timbul baik seperti timbul korban jiwa maupun kerugian materil (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007). Manajemen saat bencana mencakup aktivitas yang berkaitan dengan tanggap darurat dan bantuan darurat.

### a. Tanggap darurat

Tanggap darurat merupakan aktivitas yang mendorong penanganan dampak buruk seperti melakukan evakuasi, penyelamatan hingga memenuhi kebutuhan dasar (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017). Tanggap darurat mencakup kegiatan yang dilaksanakan ketika bencana sedang terjadi sehingga harus dilakukan secara cepat supaya tidak memicu efek buruk yang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2014 menyebutkan bahwa tanggap darurat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain :

1. Mengkaji lokasi, kerusakan, dan sumber daya dengan cepat dan tepat;
2. Menentukan situasi keadaan darurat bencana.
3. Memperkirakan tingkat bencana dan situasi keadaan darurat
4. Menyelenggarakan pertolongan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana

b. Bantuan darurat

Bantuan darurat adalah usaha untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan membagikan bantuan dasar berupa pemberian bantuan bahan dasar seperti pangan, sandang, sanitasi, air bersih, tempat tinggal sementara dan alat kesehatan (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

3. Manajemen Pasca Bencana

Manajemen pasca bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah bencana terjadi. Manajemen pasca bencana mencakup kegiatan – kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan kegiatan dalam memperbaiki dan memulihkan sarana dan prasarana publik pasca bencana terjadi dengan tujuan menormalisasikan hidup Masyarakat di daerah pasca bencana (Giri, 2017 :

20). Memperbaiki wilayah bencana, memperbaiki fasilitas umum, menyalurkan bantuan untuk membetulkan rumah masyarakat, memulihkan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, memulihkan sosial ekonomi budaya, memulihkan keamanan dan ketertiban, memulihkan fungsi pemerintahan, dan memulihkan fungsi pelayanan publik adalah beberapa cara yang dilaksanakan pada tahap rehabilitasi (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan kegiatan untuk memulihkan seperti keadaan semula sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang terjadi. Sasaran utama pemulihan adalah bertumbuhnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan di daerah yang terkena bencana (Giri, 2017:20). Rekonstruksi dilakukan pada rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non fisik (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

#### **1.6.5.2 Teori Manajemen Bencana Menurut Arie Priambodo**

Berbeda halnya dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Soehatman (2011), Arie Priambodo (2009: 17-18) dalam Tiyas Trirajayu (2015) membagi manajemen bencana dalam empat tahapan, yaitu :

1. *Mitigation* : Pengurangan – Pencegahan

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi. Mitigasi dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan yang berfokus pada pengurangan dan pencegahan terjadinya bencana.

2. *Preparedness* : Perencanaan – Persiapan

Pada tahap ini dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana. Dengan demikian, pada tahap ini dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang memerlukan perancangan yang matang dan persiapan yang memadai terkait dengan tingkat risiko bencana.

3. *Response* : Penyelamatan – Pertolongan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan – kegiatan meliputi penyelamatan dan pertolongan. Pertama, penyelamatan dilakukan untuk menolong jiwa manusia. Kedua, pertolongan dilakukan untuk mengamankan harta benda yang berhubungan bagi keberlangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

4. *Recovery* : Pemulihan – Pengawasan

Pada tahap ini dilakukan pengembalian kondisi akibat kerusakan yang ditimbulkan setelah bencana yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan berupa pemulihan agar kembali ke kondisi sebelum terjadinya bencana serta pengawasan setelah bencana terjadi.

### **1.6.5.3 Teori Manajemen Bencana Menurut Bevaola Kusumasari**

Bevaola Kusumasari (2014) dalam bukunya mengemukakan bahwa manajemen bencana dilaksanakan dalam empat tahapan, antara lain :

#### **1. Mitigasi**

Mitigasi merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Pelaksanaan mitigasi bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan dampak dari terjadinya bencana baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Mitigasi dapat dilaksanakan dalam dua hal, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural dilaksanakan menggunakan pendekatan teknologi. Sedangkan mitigasi non struktural seperti legislasi, asuransi dan perencanaan wilayah. Sebelum melaksanakan mitigasi, dilaksanakan terlebih dahulu identifikasi risiko.

#### **2. Kesiapsiagaan**

Kesiapsiagaan dilaksanakan sebelum terjadinya bencana atau sebelum diambilnya tanggap darurat. Kesiapsiagaan ini pula menunjukkan bahwa sudah siap jika terjadi keadaan bencana untuk mengambil langkah – langkah yang efektif dan efisien. Drabeck & Hoetmar dikutip oleh Bevaola Kusumasari (2010:26 – 27) menjelaskan terdapat beberapa prinsip dari kesiapsiagaan, antara lain :

1. Kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai siklus yang saling kontinu
2. Kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan saat bencana terjadi
3. Kesiapsiagaan dilakukan atas dasar pengetahuan
4. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan
5. Kesiapsiagaan berpeluang dalam mengambil langkah yang tepat

6. Perancangan sederhana merupakan sebuah target yang pasti

7. Respons Daya Tanggap

Respons dilaksanakan sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi (Shaluf (dalam Bevaola Kusumasari, 2010:28). Respons daya tanggap ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan harta benda dan mengurangi berbagai dampak negatif lainnya. Respons daya tanggap ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti evakuasi dan memberikan pertolongan kepada korban, pengadaan kebutuhan dasar, mengamankan harta bencana, pembaharuan dan pemulihan sarana dan prasarana, serta perlindungan dan pengurusan pengungsi.

3. Pemulihan (*Recovery*)

Pemulihan atau *recovery* dilaksanakan setelah terjadinya bencana. Tahapan ini dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat mengembalikan atau memulihkan infrastruktur sesuai dengan Standar Operasi Minimal dan panduan upaya jangka panjang yang telah dirancang. Pemulihan ini pun juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan lingkungan seperti sebelumnya bahkan lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi.

Gagasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu manajemen pra bencana atau sebelum bencana, manajemen saat bencana, dan manajemen pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Selain itu, pada setiap tahapan manajemen bencana dilaksanakan secara berkaitan dan seperti siklus yang terus terjadi. Sebagai suatu siklus menunjukkan bahwa tahapan ini



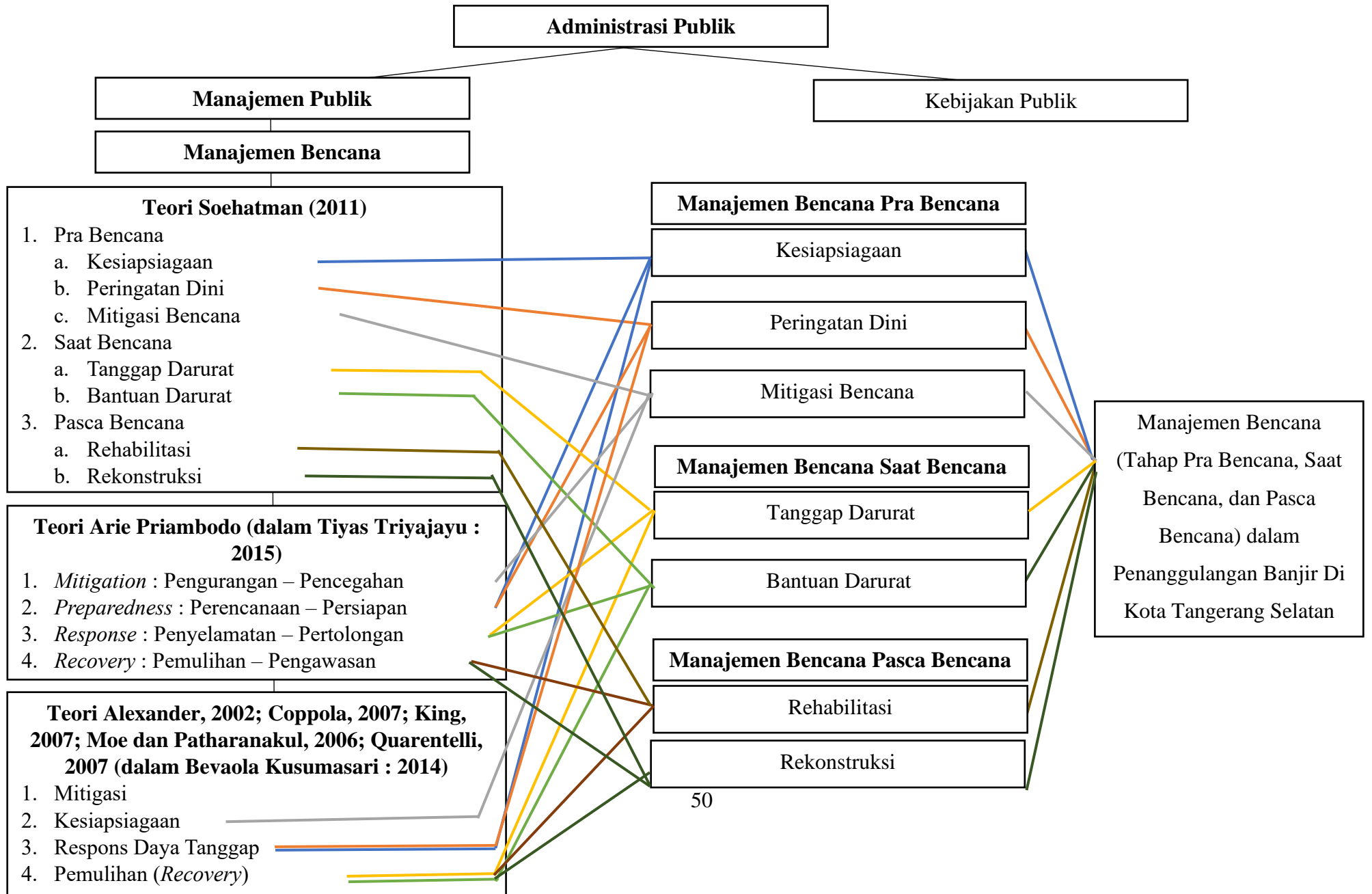
akan terus dilakukan dan saling berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen bencana yang dilakukan haruslah melalui tahapan – tahapan yang menyerupai siklus, tidak boleh ada satu tahapan yang tidak dilaksanakan sehingga manajemen bencana dapat berjalan dengan baik. Adapun siklus manajemen bencana sebagai berikut :



Gambar 1.10 Diagram Siklus Manajemen Bencana

Sumber : Buku Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Di Daerah oleh Bakornas PB

### 1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1. Manajemen Bencana**

Manajemen Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan terpadu untuk meminimalisir kerugian akibat bencana yang terjadi dengan mendorong pelibatan peran masyarakat. Manajemen bencana penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan dalam beberapa kegiatan, seperti :

- 1) Pelatihan dan penyuluhan evakuasi bencana banjir
- 2) Penyusunan peraturan terkait penanggulangan bencana banjir
- 3) Pembentukan peta rawan bencana
- 4) Penyediaan media pelaporan kejadian bencana banjir
- 5) Pelaksanaan evakuasi dan pemberian bantuan pada korban bencana banjir
- 6) Perbaikan sarana dan prasarana yang rusak

Manajemen bencana dilaksanakan dalam tiga tahapan, antara lain :

1. Manajemen Bencana Pra Bencana

Manajemen bencana tahap pra bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan, yaitu :

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan sebelum bencana terjadi melalui perencanaan langkah yang tepat.

- a) Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana banjir
- b) Adanya rencana tanggap darurat bencana banjir
- c) Penyusunan kebijakan, peraturan dan panduan untuk kesiapsiagaan bencana banjir
- d) Tersedianya sistem peringatan bencana banjir
- e) Kemampuan mobilisasi sumber daya dalam penanggulangan banjir.

b. Peringatan Dini

Peringatan dini merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi dan peringatan sebelum bencana datang terutama bagi wilayah yang rawan terjadi bencana.

- a) Adanya pendeteksian dan peramalan potensi banjir

- b) Pelaksanaan peringatan dan penyebaran informasi peringatan dini
- c) Respons terhadap informasi potensi banjir
- d) Adanya peta rawan bencana.

c. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.

- a) Adanya pembangunan sarana dan prasarana penunjang penampung air hujan
- b) Peningkatan edukasi terkait mitigasi banjir.

2. Manajemen Bencana Saat Bencana

Manajemen bencana tahap saat bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan saat terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu :

a. Tanggap darurat

Tanggap darurat merupakan suatu langkah melakukan evakuasi atau penyelamatan para korban bencana termasuk meminimalisir kerugian yang dihasilkan dari bencana yang terjadi.

- a) Ketanggapan dalam melakukan evakuasi bencana banjir

- b) Kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan evakuasi banjir
- c) Ketersediaan logistik penunjang evakuasi banjir
- d) Kesesuaian SOP dengan pelaksanaan evakuasi banjir
- e) Adanya penentuan status bencana

b. Bantuan darurat

Bantuan darurat merupakan pemberian bantuan kepada korban bencana baik berupa sandang, pangan, obat – obatan dan kebutuhan lainnya yang menunjang korban bencana.

- a) Ketersediaan logistik bantuan kepada korban banjir
- b) Kemerataan distribusi bantuan kepada korban banjir

3. Manajemen Bencana Pasca Bencana

Manajemen bencana tahap pasca bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu :

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi sarana dan prasarana publik yang mengalami kerusakan ringan akibat dari bencana yang terjadi.

- a) Adanya pemulihan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir
- b) Ketersediaan sumber daya dalam melakukan pemulihan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir
- c) Adanya pemulihan pada psikososial korban banjir

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sarana dan prasarana publik yang mengalami kerusakan berat akibat bencana yang terjadi serta pemulihan pada aspek non fisik.

- a) Adanya pembangunan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir
- b) Ketersediaan sumber daya dalam melakukan pembangunan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis metode penelitian yang menggambarkan, menggali dan menafsirkan maksud beberapa individu atau sekelompok orang yang diduga berakar dari persoalan sosial atau kemanusiaan dengan cara memberikan pertanyaan – pertanyaan, menghimpun data dari partisipan secara khusus, menelaah data secara induktif, dan menerjemahkan data (dalam Sugiyono, 2022). Selanjutnya, Creswell (2012) membedakan penelitian kualitatif menjadi 5 pendekatan yaitu deskriptif, studi kasus, *grounded theory*, fenomenologi, dan *ethnography* (dalam Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menguraikan, menjabarkan, mendeskripsikan, menerangkan, dan menanggapi secara rinci terkait permasalahan yang diteliti dengan menggali seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian secara maksimal (Sugiyono, 2022). Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menguraikan keadaan sebenarnya dalam bentuk kata – kata atau penjelasan. Peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.



### 1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi yang dijadikan peneliti dalam melakukan pengamatan terkait suatu gejala atau peristiwa di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan dengan fokus penelitian yaitu melihat bagaimana pelaksanaan manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.

### 1.9.3 Fenomena Penelitian

**Tabel 1.3 Fenomena Penelitian**

<b>Konsep</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Gejala</b>
Manajemen Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan terpadu untuk menekan kerugian akibat bencana yang terjadi dengan mendorong pelibatan peran masyarakat. Manajemen bencana dilakukan dalam tiga tahap, antara lain :		
1. Manajemen Bencana Pra Bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat terminimalisir, melalui Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana.	1. Manajemen Bencana Pra Bencana	1. Kesiapsiagaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana banjir</li> <li>b) Adanya rencana tanggap darurat bencana banjir</li> <li>c) Penyusunan kebijakan, peraturan dan panduan untuk kesiapsiagaan bencana banjir</li> <li>d) Tersedianya sistem peringatan bencana banjir</li> <li>e) Kemampuan mobilisasi sumber daya dalam penanggulangan banjir.</li> </ol> 2. Peringatan Dini <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya pendeteksian dan peramalan potensi banjir</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Pelaksanaan peringatan dan penyebaran informasi peringatan dini</li> <li>c) Respons terhadap informasi potensi banjir</li> <li>d) Adanya peta rawan bencana.</li> </ul> <p>3. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya pembangunan sarana dan prasarana penunjang penampung air hujan</li> <li>b) Peningkatan edukasi terkait mitigasi banjir.</li> </ul>
<p>2. Manajemen Bencana Saat Bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan saat terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat terminimalisir melalui Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat.</p>	<p>2. Manajemen Bencana Saat Bencana</p>	<p>1. Tanggap Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketanggapan dalam melakukan evakuasi bencana banjir</li> <li>b) Kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan evakuasi banjir</li> <li>c) Ketersediaan logistik penunjang evakuasi banjir</li> <li>d) Kesesuaian SOP dengan pelaksanaan evakuasi banjir</li> <li>e) Adanya penentuan status bencana</li> </ul> <p>2. Bantuan Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kesiadaan logistik bantuan kepada korban banjir</li> <li>b) Kemerataan distribusi bantuan kepada korban banjir</li> </ul>
<p>3. Manajemen Bencana Pasca Bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat terminimalisir melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p>	<p>3. Manajemen Bencana Tahap Pasca Bencana</p>	<p>1. Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya pemulihan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir</li> <li>b) Ketersediaan sumber daya dalam melakukan pemulihan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir</li> <li>c) Adanya pemulihan pada psikososial korban banjir</li> </ul> <p>2. Rekonstruksi</p>

		<p>a) Adanya pembangunan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir</p> <p>b) Ketersediaan sumber daya dalam melakukan pembangunan pada sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir</p>
--	--	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

#### 1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi di dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian berupa individu atau sekelompok orang yang memiliki informasi akurat terkait dengan peristiwa atau gejala yang diteliti oleh peneliti sehingga subjek penelitian dapat dikatakan sebagai informan. Di dalam menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu cara penentuan sampel dengan menetapkan kriteria – kriteria tertentu (Sugiyono, 2022:24).

**Tabel 1.4 Pemilihan Informan**

No	Status	Teknik Pemilihan	Jumlah
1	Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	1
2	Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	1
3	Staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	2
4	Staff Kelurahan yang terdampak banjir di Kota Tangerang Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	3
5	Masyarakat terdampak banjir di Kota Tangerang Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	3
<b>Total</b>			<b>10</b>

### **1.9.5 Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2022) jenis data dibedakan menjadi dua, antara lain :

#### **1. Data Kualitatif**

Data yang berbentuk kata, skema, dan gambar bukan berupa angka atau numerik disebut sebagai data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana peneliti akan menggambarkan suatu fenomena yang diteliti di lapangan yang nantinya dijabarkan dalam bentuk kata – kata atau pernyataan.

#### **2. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif merupakan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan.

### **1.9.6 Sumber Data**

Sumber data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti saat penelitian sedang berlangsung (Sugiyono, 2022). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data yang didapatkan langsung dari informan bukan melalui perantara disebut data primer. Cara memperoleh data primer dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan sebagai data primer.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh bukan dari sumbernya, misalnya melalui orang lain atau hasil referensi yang sudah ada disebut sebagai data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal artikel, media massa, dan peraturan – peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari artikel jurnal, media massa, undang – undang terkait manajemen bencana dan banjir di Kota Tangerang Selatan, data banjir, *website* BPBD, berita *online*, buku dan penelitian terdahulu yang relevan.

### 1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2022). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dengan melakukan secara langsung dengan seluruh panca indera yang kita miliki (Dadang Iskandar, 2015). Di dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan melihat secara langsung manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan menghimpun data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan sesuai dengan topik yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara, pedoman untuk wawancara haruslah disusun terlebih dahulu agar dapat dijadikan acuan serta membawa alat bantu seperti perekam suara, gambar ataupun material lain yang dapat menyokong kelancaran pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan teknik ini diharapkan dapat mendorong peneliti dalam memperoleh informasi yang akurat dan absah sesuai dengan topik yang diteliti (Stewart dan Cash, 2008). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terkait manajemen bencana penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan kepada beberapa informan.

## 3. Dokumentasi

Sugiyono (dalam Dadang Iskandar, 2015) mendefinisikan dokumentasi sebagai cara pengumpulan data melalui arsip – arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini didapat dalam bentuk gambar, rekaman video ataupun rekaman audio. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mendukung data – data sebelumnya agar lebih kredibel.

## 4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur – literatur pendukung sesuai dengan topik yang

diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mencari berbagai referensi yang berasal dari jurnal artikel, media massa, dan peraturan perundangan untuk menambah referensi dalam penelitian serta mendukung data – data sebelumnya agar lebih kredibel.

### **1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengategorikan, membuat sistematis, dan memproduksi komponen peneliti terhadap fokus penelitian. Di dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara menyeluruh dengan luwes dimana menunjukkan bebas dari batasan urutan kejadian dan keseluruhannya saling berkaitan satu sama lainnya atau saling interaktif (Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:142). Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam analisis data kualitatif, antara lain:

#### **1. Kondensasi data (*data condensation*)**

Kondensasi data adalah proses menyaring, mengabstraksikan, menyederhanakan, dan atau mentransformasikan data yang berasal dari catatan tertulis lapangan, dokumen – dokumen, transkrip wawancara, dan materi empiris lainnya. Tujuan dari kondensasi data adalah untuk mendapatkan kesimpulan melalui kegiatan membuat ringkasan, melakukan pengkodean, mengembangkan tema, membuat kategori, dan

lainnya untuk memilah data dan informasi yang tidak relevan sehingga nantinya dapat dilakukan pengecekan.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data berupa pengumpulan, penyatuan, dan pengorganisasian informasi atau data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diambil tindakan. Data disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik kesimpulan sejak proses pengumpulan data dan dilakukan verifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada proses verifikasi dilakukan dengan cara mereview kembali selama penulisan, mempelajari kembali catatan di lapangan, mempertimbangkan kembali dan bertukar pikiran, dan usaha lain yang lebih luas dalam menetapkan temuan.

### **1.9.9 Keabsahan Data**

Cara untuk menilai kualitas data atau keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Salah satu teknik yang digunakan untuk meninjau kebenaran data dengan menggunakan data lainnya sebagai pembanding dari data penelitian adalah dengan triangulasi (William Wiersma, 1986 (dalam Sugiyono, 2022)). Triangulasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber guna membuktikan keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan



salah satu cara untuk menguji kredibilitas suatu data dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data yang telah dianalisis tersebut kemudian dilakukan *member check* dengan tiga sumber data tersebut.